



TRADISI WIWITAN : Masyarakat Cangkring, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten, membawa hasil bumi pada tradisi wiwitan, Jumat (25/3). Tradisi yang digelar petani menjelang panen raya tersebut untuk memohon agar mendapat hasil panen melimpah.

KR-Sukro Riyadi

TERKAIT INVESTASI ILEGAL PPATK Bekukan 17 Rekening

JAKARTA (KR) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp 77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. "Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp 502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening," kata Kepala PPATK Ivan Yustiananda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/3).

Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara tran-

saksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal.

Selain itu, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana.

Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Ivan menambahkan, memasuki usia 20 tahun sejak berdiri pada 17 April 2022, PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). (Ant)-d

JADI PERSYARATAN MUDIK

DIY Antisipasi Kenaikan Vaksinasi Booster

YOGYA (KR) - Pemerintah memutuskan memperbolehkan masyarakat mudik Idul Fitri 1443 H. Bagi masyarakat yang mudik disyaratkan telah divaksin booster atau vaksin Covid-19 dosis ketiga. Ketentuan tersebut memicu kenaikan animo masyarakat mengikuti vaksin.

"Meski untuk DIY, vaksin booster belum menunjukkan kenaikan signifikan. Tapi pasca adanya kebijakan pemerintah soal mudik, ada kemungkinan minat masyarakat untuk vaksin booster mengalami kenaikan. Pemda DIY melakukan persiapan untuk menghadapi potensi kenaikan minat vaksin. Salah satu caranya mengoptimalkan sentra pelayanan vaksinasi di lima kabupaten/kota," kata Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi Covid-19

di DIY, Sumadi di Kompleks Kepatihan, Jumat (25/3).

Sumadi mengungkapkan, Pemda DIY terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan sentra vaksin baik yang ada di Dinas Kesehatan DIY, RS maupun Puskesmas yang tersebar di semua wilayah DIY. Sentra layanan vaksin di RS diantaranya ada di RS Akademik UGM, RS Grhasia, dan RS Respira di Sleman. Karena jumlah sentra vaksin dirasa masih mencu-

kupi, pihaknya belum berencana untuk menambah jumlah sentra vaksin. Adapun untuk ketersediaan vaksin Covid-19 di daerah dipastikan masih mencukupi. "Saat dilakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring bersama dengan Kementerian Kesehatan. Dipastikan stok vaksin Covid-19 di dalam negeri memadai. Jadi seandainya ada peningkatan pemberian vaksinasi booster bagi para pemudik sebelum mereka melakukan perjalanan pulang kampung, saya kira tidak ada masalah," ungkapnya.

Menurut Sumadi, apabila keberadaan sentra vaksin bisa optimal, diprediksikan bakal ada 700 ribu orang yang telah menerima booster sebelum libur Lebaran tiba.

Sebanyak 700 ribu orang tersebut setara dengan 25 persen dari total sasaran vaksinasi di DIY yang berjumlah sekitar 2,8 juta orang.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah sebanyak 196 kasus sehingga total 218.693 kasus pada Jumat (25/3). Rerata kasus positif harian mencapai 5,29 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 15.187 kasus. "Kasus Covid-19 trennya masih cukup tinggi di DIY. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yang baru 162 kasus berasal dari tracing kontak kasus positif dan 34 kasus periksa mandiri," ujarnya. (Ria/Ira)-f

Perguruan Tinggi Harus Perbanyak Pendidikan Vokasi

CIANJUR (KR) - Pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya membangun SDM unggul dan berkualitas. Pasalnya, pendidikan vokasi lebih berfokus pada pengembangan skill dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat ini Presiden RI Joko Widodo menekankan agar pendidikan vokasi semakin diperbanyak.

Dia menuturkan, jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang perlu diperbanyak adalah pendidikan vokasi, kemudian pendidikan akademik dan profesi. Hal itu disampaikan dalam persemian fasilitas Universitas Gunadarma Techno Park (UGTP), di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Jumat (25/3).

"Sekarang ini kan semua perguruan tinggi kebanyakan membuat fakultas yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi. Tetapi yang memberikan keleluasaan agak luas dalam hal pekerjaan, skill, keterampilan menengah itu masih kurang," ujar Muhadjir.

Menko Muhadjir menyampaikan, Universitas Gunadarma menjadi contoh baik dalam pengembangan pendidikan vokasi. (Ati)-d

GELAR MACAPAT DINAS KEBUDAYAAN DIY

Menggabungkan Macapat, Geguritan dan Teatrikal

MASIH dalam rangkaian peringatan 73 tahun Serangan Umum 1 Maret 1949 sekaligus mangayubagya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, tentang ditetapkan Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY menyelenggarakan acara Gelar Macapat di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY, Kamis (24/3) malam.

Gelar Macapat yang didanai dengan Dana Keistimewaan ini menampilkan peserta dari kabupaten dan kota yang terdiri mahasiswa, siswa SMA serta guru bahasa Jawa dengan narasumber KMT Projosuwasono. Acara ini ditayangkan secara *live streaming* melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan DIY: *tasteof jogja disbud diy*.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY Dian Laksmi Pratiwi SS MA dalam sambutan yang disampaikan dalam bahasa Jawa mengatakan, Gelar Macapat ini rutin diadakan tiap tahun oleh Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY.

Dian menegaskan, Dinas Kebudayaan DIY akan terus mendukung diadakannya Gelar Macapat dengan harapan macapat te-

tap lestari dan terus berkembang melalui gagasan kreatif yang bisa menarik perhatian generasi muda. "Macapat ini merupakan Warisan Budaya Tak Benda yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019," kata Dian.

Dikatakan, tembang macapat merupakan salah satu sastra Jawa yang mengandung *pitutur* dan *piwulang*. Menurut Purbatjaraka dan Karseno Saputra, tembang macapat sudah ada sejak tahun 1541 Masehi berdasarkan Kidung Surbrata dan Rasa Dadi Jalma. Pada saat itu, sastra Jawa sudah berkembang, antara lain ditandai dengan tembang yang menggunakan bahasa Jawa kuna, Jawa tengah dan bahasa Jawa baru seperti kakawin, kidung maupun macapat.

Gelar Macapat kali ini, menurut Kepala Bidang Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Dinas Kebudayaan DIY Tri Agus Nugroho SSos MSI dikemas secara berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya. "Formatnya menggabungkan macapat, geguritan dan teatrikal," katanya.

Untuk menampilkan visualisasi peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret digunakan layar sebagai latar belakang. "Tapi



Gelar Macapat yang digelar di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY.

KR-Wawan Isnawan

layar ini fungsinya bukan primer melainkan sekunder. Karena seni macapat itu lebih pada aspek syairnya," katanya.

Selain itu, dalam Gelar Macapat kali ini, macapat dikembalikan pada konstruksi yang sebenarnya. "Konstruksi macapat itu syair yang dimaknai, diartikan," katanya.

Seni macapat menarik diikuti, sebab kalimat macapat sarat dengan makna, dan setiap kalimat disertai dengan kupasan apa yang terkandung dalam kalimat macapat.

Agus menambahkan,

kebudayaan Jawa itu adaptif dan lentur dalam memaknai segala peristiwa. Namun demikian, Gelar Macapat yang dikemas sedemikian rupa bukan semata dimaksudkan untuk mendekati generasi milenial, melainkan agar bisa dinikmati oleh siapapun tidak terkecuali generasi milenial.

Gelar Macapat ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan seni macapat dengan melibatkan kelompok macapat perwakilan dari kabupaten dan kota serta generasi muda. Harapannya ada kesinambungan sehingga pelestarian macapat bisa terjaga.

Gelar Macapat sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah melalui Dinas Kebudayaan DIY memberikan ruang kelompok macapat untuk unjuk kebolehan dalam macapat.

Gelar Macapat diawali dengan pembacaan sejarah Serangan Umum 1 Maret dengan latar belakang film dokumenter Serangan Umum 1 Maret, dilanjutkan dialog tentang macapat bersama Dian Laksmi Pratiwi SS MA, Tri Agus Nugroho SSos MSI dan Setya Amrih Prasaja SS

dipandu Gilang Sanjaya.

Dalam Gelar Macapat ini juga dibawakan lagu-lagu perjuangan dengan iringan gamelan seperti Maju Tak Gentar, Sorak-sorak Bergembira. Lantas, adakah pesan khusus yang akan disampaikan melalui Gelar Macapat ini?

"Macapat adalah seni tradisi yang masih lestari dan akan lestari. Melalui gelar macapat kali ini, lagu bernuansa perjuangan pun bisa dikolaborasi dengan musik tradisional Jawa (gamelan). Harapannya, generasi muda akan tergerak untuk lebih men-

cintai dan melestarikannya," kata Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan DIY Setya Amrih Prasaja SS.

Menurut Amrih, macapat di masyarakat masih terus berkembang. Banyak kelompok masyarakat yang terus melestarikannya. Untuk itu, sebagai sebuah Warisan Budaya Tak Benda yang telah diakui secara nasional dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu Dinas Kebudayaan DIY akan konsisten menyelenggarakan Gelar Macapat. (Wan)



KR-Wawan Isnawan

Dialog macapat bersama Dian Laksmi Pratiwi SS MA, Tri Agus Nugroho SSos MSI dan Setya Amrih Prasaja SS dipandu Gilang Sanjaya.



KR-Wawan Isnawan

Pembacaan sejarah Serangan Umum 1 Maret dalam Gelar Macapat.